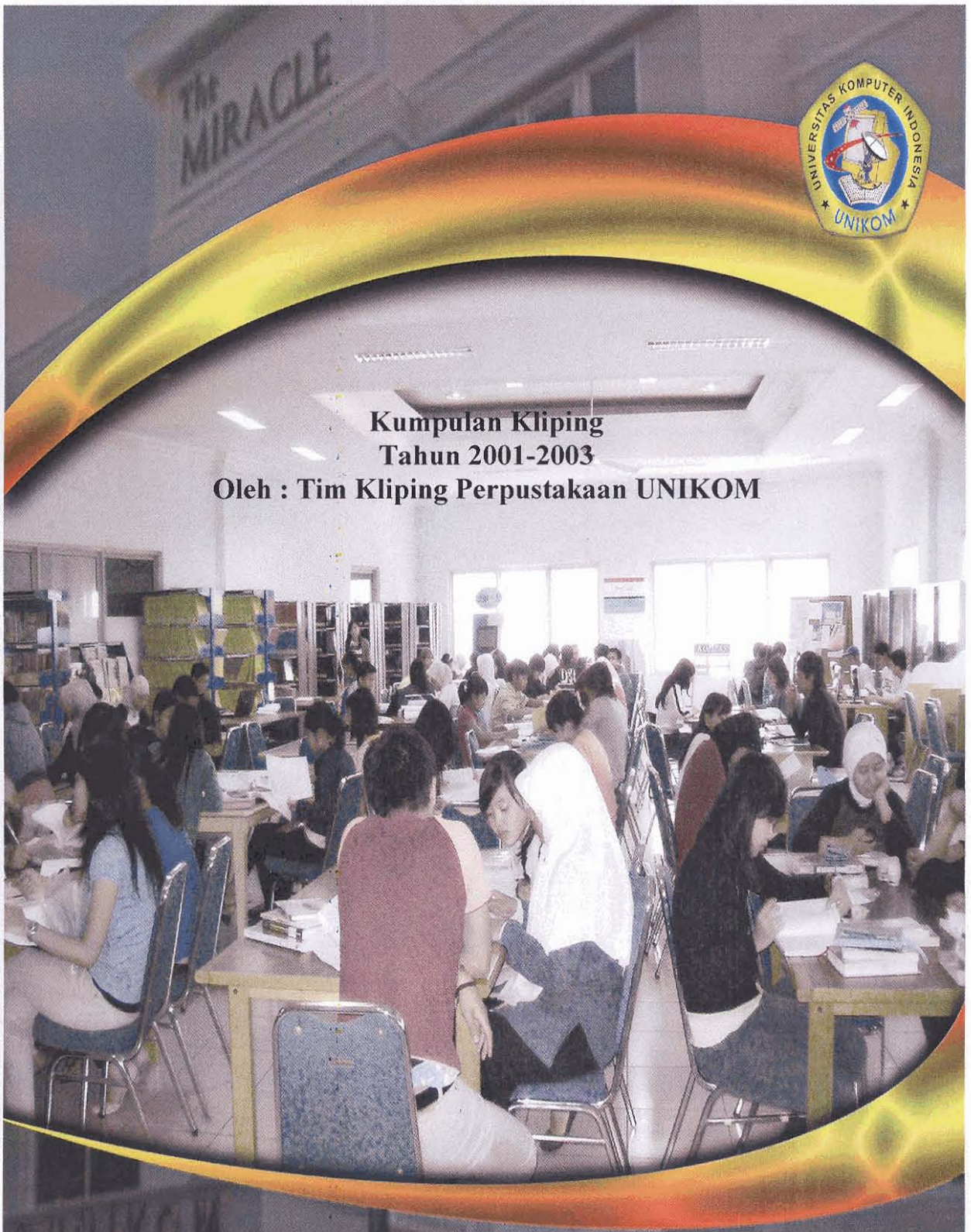


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 ✓ 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : SABTU / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : 1 / 3-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : -
Judul ~~Artikel~~/ Berita : RAPBN 2000 : Swasta Diandalkan Dorong Pertumbuhan
SUBJEK : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
1351.72

RAPBN 2002 *Swasta Diandalkan Dorong Pertumbuhan*

Jakarta, Kompas

Pengeluaran negara yang direncanakan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2002 sebesar Rp 332,4 trilyun, sedangkan rencana penerimaan Rp 289,4 trilyun sehingga terjadi defisit anggaran Rp 43 trilyun atau 2,5 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan volume anggaran yang kecil itu—turun 2,3 persen dari tahun lalu—pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar lima persen akan didorong dengan partisipasi swasta.

Demikian Presiden Megawati Soekarnoputri ketika menyampaikan pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2002 pada Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Akbar Tandjung di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/9). Semula Nota Keuangan dan RAPBN 2002 akan disampaikan berbarengan dengan pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus, namun diundur karena Kabinet Gotong Royong baru terbentuk 9 Agustus 2001.

"Defisit ini lebih kecil dari perkiraan di tahun berjalan, yang sekitar 3,7 persen PDB. Dengan defisit yang lebih rendah, kebutuhan sumber pembiayaan termasuk dari pinjaman juga menjadi lebih kecil. Hal ini selaras dengan upaya mencapai kesinambungan fiskal," kata Presiden.

Pada kesempatan itu Presiden sempat membacakan angka penerimaan negara yang salah cetak. Presiden menyebutkan, di sisi penerimaan negara, dalam RAPBN 2002 dirancang pemasukan sebesar Rp 291,4 trilyun. Padahal, seharusnya Rp 289,4 trilyun sesuai dengan pernyataan Presiden yang menyebutkan defisit anggaran sebesar Rp 43 trilyun dari pengeluaran negara sebesar Rp 332,4 trilyun.

Menurut Presiden, sumber pembiayaan defisit berasal dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, diperoleh dari privatisasi BUMN dan penjualan aset yang dikelola Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Privatisasi BUMN akan dilakukan secara selektif dan direncanakan sekitar Rp 4 trilyun. Sementara penjualan aset BPPN ditargetkan mencapai Rp 21,5 trilyun.

Peran swasta

Pemerintah mengakui, pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar lima persen dalam RAPBN 2002 tak dapat diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan di saat kondisi ekonomi seperti ini. Harapan pemerintah adalah kepada kepercayaan dari para pelaku ekonomi di dunia usaha, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan.

"Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, saya kira stimulusnya justru dari dunia usaha atau swasta. Kita mengandalkan penciptaan lapangan kerja yang berasal dari mereka, para pelaku usaha. Di sana kita harapkan kembalinya kepercayaan di antara para pelaku ekonomi," demikian Menteri Keuangan Boediono, menjawab pertanyaan wartawan, dalam keterangan pers untuk menjelaskan RAPBN 2002 dan Nota Keuangan, Kamis (6/9) malam.

Sebelumnya, di tempat yang sama, Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menyatakan dengan perencanaan anggaran belanja yang jumlahnya kecil ini, pemerintah hanya mendukung dan membenahi infrastruktur yang ada.

Pembangunan sarana fisik diakui sangat minimal, dan sangat dibatasi pada pemeliharaannya saja. Sebab itu, upaya penciptaan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja sepenuhnya ditentukan oleh kegiatan masyarakat dan dunia usaha.

Dalam RAPBN 2002, pemerintah menentukan anggaran belanja pembangunan sebesar Rp 47,1 trilyun, yang bersumber dari pembiayaan rupiah murni sebesar Rp 22,7 trilyun dan dana pinjaman luar negeri sebesar Rp 24,3 trilyun. Sementara, pengeluaran rutin pemerintah pusat dianggarkan Rp 195,0 trilyun.

Menurut Kwik, anggaran belanja pembangunan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan departemen atau lembaga di berbagai sektor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, juga digunakan untuk program penanggulangan dampak pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang direncanakan senilai Rp 1,77 trilyun.

Presiden pun dalam pidatonya menyatakan, untuk mengatasi pengangguran, penanggulangan kemiskinan, sangat tergantung dari upaya pemulihan ekonomi. Untuk sebagian besar perwujudan itu, akan ditentukan peran swasta, karena begitu terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah. Dikatakan pula, sumber pertumbuhan juga diharapkan dari ekspor nonmigas. Akan diupayakan mengurangi hambatan distribusi, meningkatkan pembiayaan perdagangan, mengatasi masalah perburuhan, mengurangi hambatan perdagangan dengan negara-negara industri, dan memperluas pasar ekspor.

Untuk mengurangi daya turunnya daya dukung infrastruktur, Presiden mengharapkan partisipasi masyarakat. Untuk itu berbagai kebijakan dan termasuk peraturan perundang-undangan akan disempurnakan. Antara lain, melalui restrukturisasi kebijakan tarif dan deregulasi sistem perizinan di sektor energi, termasuk ketenagalistrikan, transportasi, pos, telekomunikasi, dan informatika.

Perpajakan

Presiden menegaskan, demi prinsip efisiensi dan keadilan, berbagai penangguhan pengenaan pajak akan semakin dikurangi. Kebijakan di bidang ini akan lebih bertumpu pada ekstensifikasi. Di samping penerimaan pajak, pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direncanakan dapat mencapai Rp 72,6 trilyun.

"Penerimaan sebesar itu antara lain diharapkan dapat diperoleh melalui peningkatan kesehatan dan kinerja BUMN, serta peninjauan kembali besarnya penerimaan bagian pemerintah dari laba BUMN. Langkah lainnya, mengintensifkan penagihan tunggakan utang pemda dan BUMD," tambah Kepala Negara.

Dari penerimaan tersebut, sebagian akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin yang diperkirakan Rp 196 trilyun. Sedangkan dua jenis pengeluaran utama adalah pembayaran bunga obligasi pemerintah dalam rangka restrukturisasi perbankan yang diperkirakan akan mencapai Rp 61,1 trilyun dan subsidi BBM.

Kepala Negara mengatakan, pemerintah akan mengupayakan agar BPPN dapat segera merestrukturisasi aset dan seba-

Perpustakaan Unikom
hlm. 345

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 / 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Judul Artikel/ Berita : .....
.....

gian hasilnya akan digunakan u[illegible]menarik kembali obligasi p[illegible]ntah. Selain itu akan pu[illegible]ntaskan verifikasi terhadap surat utang pemerintah kepada Bank Indonesia (BI).

Beba[illegible]n yang juga berat, lanjut Presiden, subsidi BBM dalam tahun [illegible]001 ini. Meskipun harga BBM dalam negeri telah dinaikkan, jumlah subsidi yang disediakan dalam APBN 2001 masih sangat besar, yaitu Rp 53,8 trilyun. Jumlah tersebut lebih besar dari jumlah yang disediakan untuk anggaran pembangunan dalam tahun tersebut yang berjumlah Rp 45,5 trilyun.

[illegible]msi BBM dari waktu ke waktu terus meningkat sehingga beban subsidinya pun terus bertambah. Oleh karena itu pengurangan subsidi menjadi sangat perlu karena kalau tidak, kita tidak dapat memiliki dana yang cukup untuk membiayai kegiatan pembangunan, kata Presiden.

Keputusan ini sangat berat, untuk menjaga kesinambungan anggaran negara yang merupakan prasyarat penting bagi pemulihan ekonomi.

(gun/har/mar/boy/fer)

APBN 2001 DAN RAPBN 2002 (Trilyun Rupiah)

URAIAN	2001		2002		
	APBN Penyesuaian	% thd PDB	RAPBN	% thd PDB	Δ % thd 2001
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**286,0**	**19,5**	**289,4**	**17,1**	**1,2**
I. Penerimaan Dalam Negeri	**286,0**	**19,5**	**289,4**	**17,1**	**1,2**
1. Pajak	185,3	12,6	216, 8	12,8	17,0
2. Bukan Pajak	100,7	6,9	72,6	4,3	-27,9
II. Hibah	–	–	–	–	–
B. Belanja Negara	**340,3**	**23,2**	**332,4**	**19,6**	**-2,3**
I. Pemerintah Pusat	**258,8**	**17,7**	**242,1**	**14,3**	**-6,5**
1. Pengeluaran Rutin	213,4	14,5	195,0	11,5	-8,6
2. Pengeluaran Pembangunan	45,5	3,1	47,1	2,8	3,7
II. Dana Perimbangan	**81,5**	**5,5**	**90,3**	**5,4**	**10,9**
1. Dana Bagi Hasil	20,3	1,4	23,2	1,4	14,5
2. Dana Alokasi Umum	60,5	4,1	66,4	3,9	9,7
3. Dana Alokasi Khusus	0,7	0,0	0,8	0,0	10,2
C. Surplus/Defisit Anggaran (A – B)	**-54,3**	**-3,7**	**-43,0**	**-2,5**	**-20,8**
D . Pembiayaan (D.I + D.II)	**54,3**	**3,7**	**43,0**	**2,5**	**-20,8**
I. Dalam Negeri	**34,4**	**2,3**	**25,4**	**1,5**	**-26,0**
1. Privatisasi	6,5	0,4	4,0*	0,2	-39,2
2. Penjualan Aset BPPN	27,0	1,8	21,5**	1,3	-20,4
3. Obligasi Negara (neto)	0,9	0,1	–	–	–
II. Luar Negeri (neto)	**19,9**	**1,4**	**17,6**	**1,0**	**-11,7**
1. Pinjaman Proyek	23,7	1,6	24,4	1,4	3,0
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	-20,2	-1,4	-41,5***	-2,5	105,9
3. Pinjaman Program dan Penundaan Cicilan Utang	16,3	1,1	34,7	2,1	112,9
Memorandum:					
*) Total Target Privatisasi	6,5	0,4	6,5	0,4	
**) Total Target Penjualan Aset BPPN Termasuk Penarikan Obligasi	37,0	2,5	42,8	2,5	
***) Termasuk Penundaan Utang LN (Paris Club II)	27,8	1,9	5,9	0,4	

KEBIJAKAN UTAMA PENDUKUNG RAPBN 2002

- Gaji PNS/TNI Polri tetap
- Harga BBM naik 30 persen
- Tarif Dasar Listrik naik 4-6 persen per triwulan
- Dana kompensasi kenaikan harga BBM Rp 2,2 trilyun
- Perluasan jumlah wajib Pajak, peningkatan Pajak Penghasilan
- Pelaksanaan "tax amnesty" masih akan dipelajari

ASUMSI DASAR RAPBN 2002

- Pertumbuhan ekonomi 5 persen (tahun 2001 3,5 persen)
- Kurs Rp 8.500/dollar AS (Rp 9.600/dollar AS)
- Suku bunga SBI 3 bulan 14 persen (15 persen)
- Inflasi 8 persen (9,3 persen)
- Harga minyak mentah 22 dollar/barrel (24 dollar/barrel)
- Produksi BBM 1,23 juta bph (1,56 juta bph)

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : SENIN / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : I / 13-6
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SJAHRIR
Judul Artikel/ Berita : ANGGARAN Negara, kontraksi Yang Menajam.
SUBJEK : NO CLASS : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA / 352.72

Anggaran Negara, Kontraksi yang Menajam

FUNGSI anggaran dalam buku teks adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Kali ini, praktis fungsi stabilitas mendominasi anggaran. Tampaknya *survival* kita dipertaruhkan, dan pengorbanan ekstra, kini dituntut.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2002 yang disampaikan pemerintah, Jumat (8/9), nada kontraksi ekonomi betul-betul tajam. Bukan saja volume RAPBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun dari 19,5 persen menjadi 17,1 persen, tetapi juga Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meningkat amat tajam, melampaui perkiraan peningkatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, berkurangnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) mengakibatkan peningkatan harga BBM sebesar 30 persen, dan tarif listrik akan meningkat pula. Sementara itu, pembayaran utang luar negeri tetap dipenuhi sebisa mungkin sehingga yang tersisa bagi anggaran keperluan ekspansi ekonomi sama sekali tidak bisa mengimbangi faktor kontraksi ekonomi yang demikian tajamnya itu.

Komponen anggaran yang mempunyai efek mikro-ekonomi dan perbankan juga telah diubah strateginya sehingga penjualan aset BPPN dan privatisasi BUMN tidaklah semata-mata untuk menutupi defisit anggaran. Sebagian cukup besar dari penjualan tersebut akan digunakan untuk menarik surat utang pemerintah yang dikeluarkan untuk rekapitalisasi perbankan. Meskipun pada gilirannya hal tersebut amat membantu pengurangan tekanan terhadap anggaran karena berkurangnya pengeluaran bunga utang pemerintah, di situ sifat kontraksi ekonomi dirasakan amat sangat tajamnya.

Jelas diperlukan keberanian amat tinggi pihak pembuat kebijaksanaan ekonomi untuk membuat APBN yang demikian ketat, yang sama sekali tentunya tidak bisa diandalkan bagi upaya ekspansi ekonomi. Dari sini memang agak mengherankan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen. Semua orang tahu, keadaan ekonomi dunia di tahun 2002 tetap masih amat buruk, terutama Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Di tahun 2002, peran AS sebagai importir produk negara-negara sedang berkembang akan kembali merosot, sementara Jepang menghadapi guncangan dahsyat bila Perdana Menteri Koizumi benar-benar mereformasi perbankan yang bergelimpangan karena kredit macet beratus-ratus milyar dollar AS.

formal BPPN masih berada di bawah Menteri Keuangan. Kalau kita ingin mempercepat proses penjualan aset, janganlah aspek-aspek legal ini nantinya mengganggu keabsahan suatu transaksi, apalagi bila transaksi itu menyangkut nilai trilyunan rupiah.

Kedua, yang perlu dicatat adalah belum dirasakannya kaitan (*linkages*) yang efektif antara masalah makro dan mikro-ekonomi dalam anggaran. Anggaran kita bukanlah instrumen makro yang biasa karena anggaran ini berkaitan erat dengan masalah mikro yang amat penting, seperti masalah mikro-perbankan, restrukturisasi utang, dan masalah privatisasi BUMN. Di sini, amat penting melihat, bukan saja kuantitas dari penjualan aset dalam bentuk harga penjualan, tetapi juga faktor kualitasnya.

BPPN punya fungsi yang bersifat dualistis yang terkadang dapat dipertentangkan. Di satu pihak BPPN harus mencapai target penjualan aset seperti yang diamanatkan APBN. Tetapi, di pihak lain, BPPN juga berfungsi menjaga kualitas aset, jangan sampai kualitas tersebut dikorbankan sehingga penjualan dinilai merugikan negara, tetapi penundaan penjualan dapat pula menimbulkan kemerosotan harga perusahaan.

Contoh konkretnya, kasus BCA yang menurut Menneg BUMN Laksamana Sukardi akan menguntungkan pemerintah bila menjual 51 persen saham. Terlepas bahwa aktiva BCA mayoritasnya adalah surat utang, tetapi dengan *price earning ratio* yang amat rendah, katakan empat kali (4x), bijaksanakah menjual saham BCA?

Sementara itu, kita juga tahu bahwa industri semen telah makin dikuasai asing seperti PT Semen Cibinong dan PT Indocement. Bilamana proses pembelian Cemex berlangsung dan hal tersebut terjadi tanpa dirasakan sebagai kerugian bagi masyarakat di sekitar PT Semen Padang, Semen Tonasa, dan Semen Gresik, maka uang yang bisa didapatkan akan lebih besar daripada yang diperoleh dengan penjualan 51 persen saham BCA.

Begitu juga dengan kasus Grup Sinar Mas dan Bank Internasional Indonesia (BII) yang perlu dicermati apakah penyelesaian dengan membuat *hedge bond* yang ditukar dari *recycled bond* merupakan penyelesaian yang propasar. Untuk membuat pasar sekunder bagi *hedge bond*, jauh lebih sulit ketimbang pasar utang pemerintah biasa. Sementara pembicaraan tentang PT Bank Mandiri yang mengambil alih BII perlu diperhatikan seberapa jauh manfaatnya mengingat kedua bank sama-sama menghadapi masalah struktural yang tidak kecil. Diperlukan inovasi untuk mengatasi masalah Sinar Mas ini. Tentunya tidak bisa kita baca dari nota keuangan yang hanya menyebut jumlah dalam bentuk nilai aset tanpa menguraikan upaya-upaya konkret dalam menjaga kualitas aset yang dimiliki.

Bilamana betul bahwa jaminan Grup Sinar Mas di BII adalah 145 persen dari nilai utang, kita dapat membayangkan skenario di mana penjualan tersebut bisa ditukar menjadi kepemilikan saham BII, sehingga jumlah saham Grup Sinar Mas meningkat dari 20 persen menjadi 51 persen. Setelah itu dapat secara otomatis dibuat sebuah MSAA (*Master of Settlement and Acquisit on Agreement*) yang "memaksa" Kelompok Sinar Mas menjual asetnya, seraya mempertahankan aset yang dianggap perlu ditingkatkan kualitasnya, dan kemudian menidurkan surat utang pemerintah sejalan dengan penjualan aset-aset itu.

Pendek kata, kita meli[illegible] 1001 persoalan ekonomi. Penyelesaiannya harus dipikirkan dengan visi jernih, seperti kasus-kasus Chandra Asri, Texmaco, BDNI, dan Grup Gajah Tunggal, sebagai contoh konkret.

Hal ketiga, yang pantas diberi perhatian khusus adalah masalah peningkatan pajak yang tidak main-main sulitnya. Inisiatif Dirjen Pajak untuk mengumpulkan para artis bisa saja ditanggapi secara sinis. Tetapi, apa yang berlangsung betul-betul menunjukkan persoalan besar bangsa ini bahwa *tax ratio*, yang dalam pertemuan DPR dengan pemerintah yang dikatakan akan diupayakan sebesar 13,6 persen, ternyata oleh RAPBN ditargetkan hanya 12,8 persen.

Sesungguhnya, bila kita berbicara tentang pajak, itu sama musykilnya upaya penegakan hukum. Bahwa panitia anggaran DPR dan pemerintah ingin mengupayakan ekstensifikasi pajak dengan cara-cara seperti *canvassing* terhadap pengusaha-pengusaha, atau kerja sama dengan RT/ RW/ kelurahan di daerah permukiman, ataupun ekstensifikasi dengan mewajibkan pemegang kartu kredit untuk mempunyai NPWP, itu boleh-boleh saja. Tetapi, yang terpenting harus diingat, seluruh kebudayaan

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16
Hari /Bulan/ Tahun : ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /.....
Penulis : .....
Judul Artikel/ Berita : .....
.....

politik dan sistem politik kita secara esensial merupakan kebudayaan yang korup. Ini yang membedakan kita dengan negara-negara bersih. Karena itu, paling tidak, pencanangan peningkatan pajak, baik melalui ekstensifikasi ataupun intensifikasi, itu semua haruslah datang dari Presiden RI dan dipersiapkan secara matang tahapan-tahapan yang dapat memungkinkan rakyat mendukung suatu pemerintahan. Syarat terpenting di sini adalah ditimbulkannya persepsi bahwa pemerintah (juga DPR) adalah pemerintah yang bersih.

Tapi, justru di sinilah persoalannya. Dengan demikian, ketika Presiden Megawati menyebut adanya peningkatan anggaran bagi lembaga hukum dan militer, dan Polri, itu semua tidaklah menyebabkan publik percaya akan munculnya perbaikan di bidang keamanan dan penegakan hukum.

Singkatnya, bila kita menilai RAPBN 2002, maka sebagai kebijakan, instrumen anggaran adalah baik. Tetapi bila ditanya lagi di mana visi pemerintah tentang bagaimana keluar dari krisis, khususnya tentang masalah-masalah mikro-perbankan dan mikro-usaha, maka jawaban untuk pertanyaan tersebut tetap tidak kunjung *nongol*. Kita tidak akan bisa melanjutkan kebijakan tanpa visi di masa-masa mendatang.

(Dr Sjahrir, *ekonom, Ketua Umum Perhimpunan Indonesia Baru/PIB)*